

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN SAAT PANDEMI
(Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu, Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
LINTANG NURMALASARI
NPM 1811021017**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT MISKIN SAAT PANDEMI (Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung)

OLEH

LINTANG NURMALASARI

COVID-19 merupakan pandemi yang mulai terjadi pada tahun 2019 dan menimbulkan permasalahan pada bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Menurunnya kondisi perekonomian mengakibatkan jumlah masyarakat miskin semakin meningkat pada saat pandemi. Pemerintah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kesulitan selama pandemi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas BLT terhadap ekonomi masyarakat miskin saat pandemi di Pekon Panggungrejo Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengalokasian BLT di Pekon Panggungrejo Utara sudah efektif dimana hasil penelitian dari indikator tepat sasaran sebesar 90,14%.

Kata Kunci: Pandemi, Masyarakat Miskin, BLT

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF DIRECT CASH ASSISTANCE ON
THE ECONOMY OF POOR COMMUNITIES DURING THE
PANDEMIC**

**(Case Study Of Panggungrejo Utara Village, Sukoharjo Distric,
Pringsewu Regency, Lampung**

BY

LINTANG NURMALASARI

COVID-19 is a pandemic that began in 2019 and has caused problems in the health and economic sectors. The decline in economic conditions has resulted in the number of poor people increasing during the pandemic. The government allocated Direct Cash Assistance (BLT) to help poor people who experienced difficulties during the pandemic. The aim of this research is to see the effectiveness of BLT on the economy of poor communities during the pandemic in Pekon Panggungrejo Utara. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely interviews, documentation, interviews, questionnaires and observation. From the research results, it was found that the allocation of BLT in Pekon Panggungrejo Utara was effective, where the research results of the indicators on target were 90.14%.

Keywords: Pandemic, Poor Society, BLT

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN SAAT PANDEMI
(Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu, Lampung)**

**Oleh
LINTANG NURMALASARI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG
TUNAI TERHADAP EKONOMI
MASYARAKAT MISKIN SAAT PANDEMI
(Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu,
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Tintang Nurmalasari**

No. Pokok Mahasiswa

: 1811021017

Program Studi

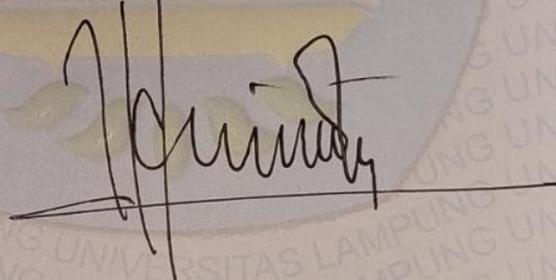
: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

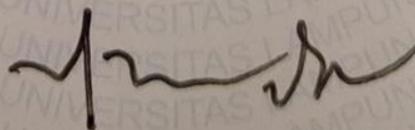
Komisi Pembimbing



Muhammad Husaini, S.E., M.E.P
NIP. 196012201989031004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

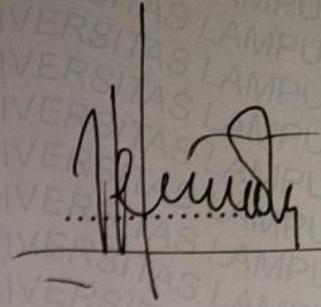


Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 196312151989032002

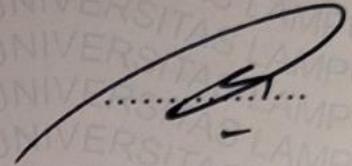
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

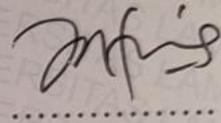
Ketua : **Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.**



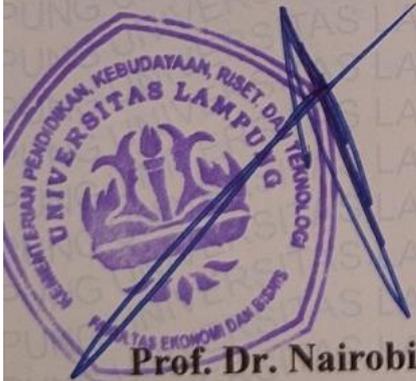
Penguji I : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E**



Penguji II : **Emi Maimunah, S.E., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Oktober 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lintang Nurmalasari

NPM : 1811021017

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi (Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung)” merupakan hasil karya saya sendiri tanpa melakukan penjiplakan terhadap karya orang lain. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan penjiplakan, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2023



Handwritten signature of Lintang Nurmalasari.

LINTANG NURMALASARI

RIWAYAT HIDUP

Lintang Nurmalasari lahir di Sukoharjo IV 28 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Toha dan Ibu Sulasmiyati dan juga merupakan adik dari Sandi Permana, dan penulis juga kakak dari Hatta Marwa Bakti. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyah Sukoharjo II dari tahun 2005 sampai tahun 2006. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Sukoharjo IV dari tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Penulis selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan dengan jalur masuk melalui SNMPTN. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan dalam Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Selama aktif di HIMEPA penulis telah mengikuti beberapa kegiatan seperti Desa Agrowisata, *Open Recruitment* mahasiswa baru tahun 2020, dan kuliah umum. Tahun 2021 penulis melakukan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (BAPPEDA).

MOTTO

“ Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”

-Ali Bin Ali Thalib

*“Jalani kehidupan hari ini sebaik mungkin supaya tidak ada rasa
penyesalan di kemudian hari*

-Lintang Nurmalasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat tuntunan, rahmat, dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi sebagai bentuk salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang strata 1 (S1) dengan judul skripsi “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi”.

Dalam proses penyusunan skripsi, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik sesuai dengan kemampuan saya. Saya berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Husaini, S.E.,M.E.P selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini telah banyak membantu dan membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang perlu untuk disempurnakan. Maka dari itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan senang hati. Saya berharap semoga tugas ini dapat berguna bagi pihak yang memerlukan

Bandar Lampung, 06 Oktober 2024

LINTANG NURMALASARI

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ

Alhamdulillahirobilalamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kusembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Toha

Ibu Sulasmiyati

Terima kasih kepada Bapak & Ibu yang selama ini selalu menemani dan menjadi support terbaik penulis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih atas segala doa dan usaha yang telah dikorbankan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.

Kakakku Tersayang, Sandi Permana

Adikku Tersayang, Hatta Marwa Bakti

Terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan sehingga dalam menghadapi kesulitan tidak merasa sendiri.

Serta

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ekonomi Pembangunan, judul skripsi ini yaitu **“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi (Studi Kasus Pekon Panggunrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S. E.,M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Husaini, S.E.,M.E.P selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E.,M.E selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Emi Maimunah, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, saran dan nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bantuan, saran dan nasihat selama proses pendidikan penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Bapak Kasim dan Ibu Mimi yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Karyawan/Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
11. Orang tuaku tersayang, Bapak Toha dan Ibu Sulasmia yang selalu memberikan dukungan, doa, usaha, serta kesabaran dalam membimbing aku selama ini sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.
12. Kakak tersayang, Sandi Permana yang selalu memberikan dukungan sehingga aku bisa menjadi lebih kuat sampai hari ini.
13. Adik tersayang, Hatta Marwa bakti yang selalu memberikan dukungan dan menjadi pendengar yang baik.
14. Sepupu tersayang, Eriska Mei Lita yang selalu memberikan dukungan setiap hari, serta memberikan dukungan, saran dan nasihat sehingga aku bisa menjadi lebih baik.
15. Teman-teman dekat dari SMA, Adolla, Indira, Aric, Huda, Yudha yang hingga saat ini menjadi teman terbaik yang selalu mendengar keluh kesahku dan memberikan dukungan terbaik.
16. Teman-teman dekat, Rani, April, Lely, Yusmanda, dan Chendy yang selalu membantu, mendukung, menemani selama masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
17. Tema-teman kosan, Dhea, Jantika, Afizah, Mba Wida yang selalu menemaniku selama dikosan sehingga tidak sendirian. Selalu memberikan dukungan yang positif walaupun banyak ributnya.

18. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 18 yang sudah menemani selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan serta bantuan selama masa perkuliahan dan menyusun skripsi.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang memerlukan.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2023

LINTANG NURMALASARI

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Kemiskinan	14
2. Teori Utilitas	18
3. Teori Perlindungan Sosial.....	18
4. Pengertian Efektivitas.....	19
5. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai.....	22
B. Tinjauan Empiris	25
1. Penelitian Terdahulu.....	25
2. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tempat dan Waktu Penelitia.....	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Batasan Operasional	31
D. Definisi Operasional Variabel.....	31
E. Populasi dan Sampel	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Pengolahan Data.....	33

H. Metode Analisis Data	33
I. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	35
J. Tabel Rancangan Analisis Deskriptif.....	35
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Pekon Panggungrejo Utara.....	37
2. Kondisi Geografis	38
3. Kondisi Sosial	38
B. Karakteristik Responden.....	40
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	47
D. Hasil Perhitungan	48
E. Pembahasan	53
BAB V Simpulan dan Saran	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Pringsewu	7
1.2 Jumlah Penduduk dan Luas Daerah	8
1.3 Jumlah Masyarakat Miskin Semua Pekon Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021	9
2.1 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Bentuk Skor Pada Kuesioner	35
3.2 Kelas Interval Hasil Kuesioner	35
3.3 Rancangan Analisis Deskriptif Kualitatif.....	36
4.1 Riwayat Kepemimpinan Pekon Panggungrejo Utara.....	38
4.2 Jumlah Penduduk Pekon Panggungrejo Utara.....	38
4.3 Jumlah Sarana Pendidikan dan Kesehatan	39
4.4 Uji Validitas	47
4.5 Uji Reliabilitas	48
4.6 Efektivitas Bantuan Langsung Tunai	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin kota dan desa di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021	6
1.2 Jumlah Masyarakat Miskin dan penerima BLT Pekon Panggungrejo Utara Tahun 2018-2021	10
2.1 Kurva Utilitas.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona merupakan sebutan untuk virus yang muncul pada tahun 2019 yang berasal dari Wuhan, China. WHO menyebutkan bahwa penyakit yang mulai menyebar dan menyerang manusia dengan ciri-ciri terpapar virus yaitu mengalami demam tinggi, kehilangan indra perasa, badan pegal linu, dan hidung tersumbat dengan sebutan *Covid-19*. Kasus masyarakat terpapar Virus *Covid-19* pada 17 Maret 2022 tercatat sebesar 5.939.082 jiwa, dengan pasien sembuh sebanyak 5.523.393 jiwa, dan kasus masyarakat terpapar Virus *Covid-19* yang meninggal sebesar 153.212 jiwa. Meningkatnya masyarakat yang terpapar *Covid-19* menjadikan virus tersebut sebagai pandemi yang merugikan banyak kerugian.

Kasus terpapar virus *Corona* mulai meningkat dan menyebabkan berbagai permasalahan baru baik di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya. Dampak negatif dari adanya pandemi juga terjadi di bidang ekonomi dimana Kementerian Keuangan (2020) menyebutkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menurun pada triwulan II tahun 2020 dengan angka penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Timbulnya permasalahan akibat pandemi membuat pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Negara yang mengalami dampak negatif akibat adanya pandemi tidak hanya diraskaan oleh Indonesia, namun beberapa negara lainnya juga mengalami masalah yang sama. Diantara negara lain yang mengalami keterpurukan saat pandemi, Indonesia merupakan negara dengan penurunan yang lebih baik. Negara-negara yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi lebih buruk

dari Indonesia yaitu Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris. Singapura mengalami penurunan perekonomian sebesar 41,2%, Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 10%, dan Inggris mengalami penurunan sebesar 15%. Kondisi perekonomian nasional saat pandemi dinilai mengalami pertumbuhan yang negatif, hal tersebut ditunjukkan dari kondisi perekonomian pada triwulan I tahun 2020 sebesar 2,97%, dimana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yaitu sebesar 5,07% (Kementerian Keuangan Indonesia, 2020) .

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan saat pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan pertumbuhan ekonomi dapat disebut sebagai kontraksi pertumbuhan ekonomi dimana fenomena tersebut dapat dilihat melalui nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I 2020 sebesar 2,97 % (yoy), angka tersebut terhitung lebih kecil jika dibandingkan pada triwulan I 2019 dengan angka pertumbuhan sebesar 5,07%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga selanjutnya terjadi pada triwulan II tahun 2020 atas triwulan II 2019 dengan angka minus 5,32% (yoy). Keterlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat pandemi membuat pemerintah harus memikirkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring waktu, dengan begitu pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan (Irfan, 2021).

Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah guna menangani permasalahan yang sedang terjadi dimana pemerintah Indonesia merencanakan kebijakan guna mendukung program pemulihan perekonomian nasional dengan mengalokasikan dana APBN dengan fokus Pemulihan Ekonomi Nasional saat pandemi. Target yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pemulihan perekonomian nasional yaitu pada triwulan III tahun 2020 perekonomian Indonesia tidak terus-menerus mengalami penurunan. Kementerian Keuangan (2020) menyebutkan bahwa jika target pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi tercapai, maka dapat diharapkan bahwa pada triwulan IV perekonomian Indonesia dapat

membalik dengan kondisi perekonomian dapat bertumbuh positif sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 akan teratasi dengan baik, disamping itu pula kondisi masyarakat miskin di Indonesia juga dapat terbantu.

Kemiskinan menurut (*World Bank*, 2012) didefinisikan sebagai kondisi suatu masyarakat yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, kurang terpenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat miskin. *World Bank* juga menyebutkan bahwa kemiskinan menurut standar global adalah kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan dengan pendapatan minimum sebesar US\$ 1 per hari. Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu masyarakat tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan. Ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan pengertian kemiskinan secara umum.

Pada tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan baik di kota maupun di desa mengalami penurunan. Menurunnya angka kemiskinan di perkotaan terjadi pada bulan Maret 2021 dengan angka 7,89% dan pada September 2021 mengalami penurunan kemiskinan menjadi 7,60%. Sedangkan, pada daerah pedesaan angka kemiskinan pada bulan Maret 2021 sebesar 13,10% dan mengalami penurunan pada bulan september menjadi 12,53% (Badan Pusat Statistik, 2021).

PERMENDES Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menyatakan bahwa tahun 2020 dana desa akan digunakan untuk menunjang terlaksananya program-program desa dengan tujuan pendanaan kegiatan pemerintah, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2020 ditetapkannya anggaran dana desa yaitu sebesar 72 triliun rupiah. Besaran dana yang akan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) yaitu sebesar

20%-30% dari jumlah dana desa yang telah dianggarkan. Program BLT dinilai dapat diterapkan secara efektif selama enam bulan dimana target Program BLT adalah rumah tangga (Carly, 2020). Pada tahun 2022 Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan Dana Desa sebesar 68 triliun rupiah yang ditujukan kepada 74.960 desa pada 434 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan, bahwa pandemi *Covid-19* telah menjadi bencana non alam yang melanda dunia dan Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa diatas bahwa dana desa akan digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti bencana non alam yang sedang terjadi. Dana desa akan digunakan untuk menanggulangi masalah yang sedang terjadi yang memiliki sifat harus segera dilakukan penanganan. Dengan meluasnya masalah yang disebabkan oleh pandemi maka pemerintah Indonesia membuat suatu program yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yaitu dalam bentuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesulitan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan selama pandemi yaitu dengan mengalokasikan jenis bantuan yang berasal dari dana desa, dimana bantuan tersebut dinamakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Harapan dan tujuan pemerintah dalam mengalokasikan BLT adalah untuk membantu dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi kesulitan pemenuhan kebutuhan selama pandemi akibat kondisi ekonomi yang menurun (Carly, 2020). PERMENDES Nomor 7 tahun 2020 pasal 8a menerangkan bahwa BLT adalah salah satu bentuk program penanggulangan dari permasalahan akibat adanya pandemi *Covid-19* yang dirasakan oleh masyarakat miskin saat kesulitan memenuhi kebutuhan selama pandemi. Para calon penerima BLT memiliki beberapa kriteria yang dimana

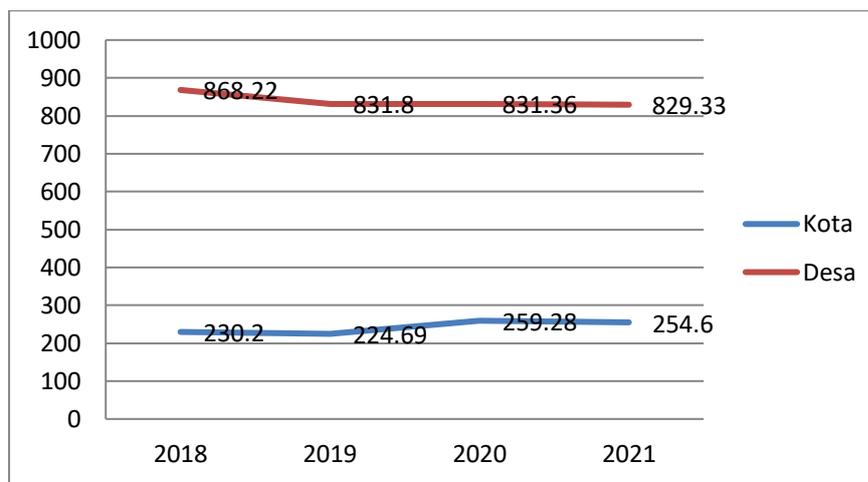
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus dalam kondisi tidak sedang menerima jenis bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan tidak memiliki kartu Pra Kerja.

Instruksi Presiden No.12/2005 Tentang Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang kemudian dilakukan pembaharuan menjadi Instruksi Presiden No.3 Tahun 2008 Tentang Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga, dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi wabah yang menyebar di masyarakat seperti saat ini ketika pandemi mulai menyebar di seluruh wilayah Indonesia maka dana desa yang awalnya akan digunakan untuk pembangunan fisik guna menunjang dan meningkatkan kegiatan perekonomian akan dialih fungsikan untuk menangani masalah yang disebabkan karena pandemi yaitu kesulitan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.

Pemerintah Indonesia melaksanakan suatu program atau kegiatan guna mengatasi permasalahan yang timbul karena pandemi khususnya pada bidang ekonomi yaitu dengan melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT yang bersumber dari dana desa akan dialokasikan kepada masyarakat miskin yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi untuk mendukung masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Dalam penelitian yang ditulis oleh (Carly, 2021) menyebutkan bahwa penyaluran Program BLT sudah tepat waktu dan pemerintah desa telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan mekanisme penyaluran yang ada. Peran Program Bantuan Langsung Tunai dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin selama pandemi dinilai berpengaruh dan masyarakat merasakan manfaat dengan adanya Program BLT masyarakat miskin merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk sehari-hari.

Peningkatan angka kemiskinan saat pandemi merupakan permasalahan yang dirasakan disemua wilayah Indonesia. Dampak negatif akibat pandemi juga dialami oleh masyarakat Provinsi Lampung, dimana angka kemiskinan Provinsi

Lampung tahun 2021 mengalami peningkatan. Angka kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2018 sebesar 1097,05 ribu jiwa, tahun 2019 angka kemiskinan sebesar 1063,66 ribu jiwa, tahun 2020 sebesar 1049,32 ribu jiwa, dan angka kemiskinan tahun 2021 meningkat menjadi 1083,93 ribu jiwa. Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menghadapi permasalahan kemiskinan hampir merata diseluruh daerah baik di desa maupun kota.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Jumlah penduduk Miskin Pedesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 (Ribuan Jiwa)

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah masyarakat miskin di kota dan di desa pada Provinsi Lampung tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di desa sebesar 868,22%, tahun 2019 sebesar 831,80%, tahun 2020 sebesar 831,36%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 829,33%. Sedangkan persentase penduduk miskin di kota pada tahun 2018 sebesar 230,20%, tahun 2019 sebesar 224,69%, tahun 2020 sebesar 258,28%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 254,60%. Kesenjangan masyarakat miskin di kota dan di desa menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung daerah pedesaan memiliki masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota yang dimana Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Adiluwih, Ambarawa, Banyumas,

Gading Rejo, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pardasuka, Pringsewu, dan Sukoharjo.

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Pringsewu Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2018-2021

NO	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1	Adiluwih	3.074	3.061	2.969	5.617
2	Ambarawa	3.254	3.436	3.488	6.401
3	Banyumas	1.922	2.230	2.234	4.205
4	Gading Rejo	7.489	7.737	7.762	14.565
5	Pagelaran	5.025	5.328	5.273	10.106
6	Pagelaran Utara	2.351	2.468	2.404	3.563
7	Pardasuka	4.984	5.223	5.214	7.979
8	Pringsewu	6.931	6.497	6.282	12.736
9	Sukoharjo	5.262	5.668	5.646	9.070
	Total	39.752	41.648	41.272	74.242

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah masyarakat miskin pada 9 Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam data yang ditampilkan pada Tabel 1, terlihat bahwa semua kecamatan di Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk miskin yang berbeda atau dapat dikatakan bahwa kesenjangan dari setiap kecamatan masih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2020 menyebutkan, bahwa pengukuran masyarakat miskin tahun 2021 mengalami peningkatan dengan angka sebelum pandemi sebesar 40% dan saat pandemi meningkat menjadi 60%. Peningkatan pengukuran masyarakat miskin dilakukan pemerintah dengan tujuan dapat mengalokasikan bantuan menjadi lebih luas dan masyarakat yang menerima lebih banyak, sebab saat pandemi banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

Meningkatnya jumlah masyarakat miskin juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu daerah yang terjadi dalam kurun waktu yang cepat dapat menimbulkan permasalahan dalam perekonomian sebab, meningkat jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pemuas kebutuhan. Ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan sedangkan faktor

produksi seperti tanah, dan persediaan pangan masih dalam jumlah tetap maka dapat terjadi kelangkaan yang menyebabkan masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan (Eka, 2018). Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi di Kabupaten Pringsewu, berikut data jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Jarak Ke Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)		Luas Daerah (km ²)	Jarak ke Kota
		2020	2021		
1	Adiluwih	36.06	36.18	74.82	26
2	Ambarawa	36.39	36.51	30.99	16
3	Banyumas	21.29	21.36	39.85	19
4	Gadingrejo	77.73	77.99	85.71	9
5	Pagelaran	52.04	52.22	72.47	14
6	Pagelaran Utara	15.3	15.35	100.28	25
7	Pardasuka	35.17	35.29	94.64	34
8	Pringsewu	81.78	82.05	53.29	6
9	Sukoharjo	49.7	49.87	72.95	15
	Total	405.46	406.82	625.1	164

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021.

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 dengan peningkatan jumlah penduduk Kecamatan Adiluwih sebesar 0,12 ribu jiwa, Kecamatan Ambarawa sebesar 0,12 ribu jiwa, Kecamatan Banyumas sebesar 0,07 ribu jiwa, Kecamatan Gadingrejo sebesar 0,26, Kecamatan Pagelaran 0,18 ribu jiwa, Kecamatan Pagelaran Utara 0,05 ribu jiwa, Kecamatan Pardasuka sebesar 0,12 ribu jiwa, Kecamatan Pringsewu sebesar 0,27 ribu jiwa, dan Kecamatan Sukoharjo sebesar 0,17. Dari data pada Tabel 1.2, maka dapat diurutkan kecamatan yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran dan Sukoharjo. Dari keempat kecamatan tersebut

Kecamatan Sukoharjo memiliki jarak tempuh paling jauh untuk ke kota dengan jarak sebesar 15 km.

Jarak yang cukup jauh untuk ditempuh dari Kecamatan Sukoharjo ke kota membuat masyarakat Kecamatan Sukoharjo mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh harian. Luas wilayah yang tidak terlalu luas membuat masyarakat Kecamatan Sukoharjo mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sebab sumber faktor produksi yang tidak beragam dan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat Miskin Semua Pekon Di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021

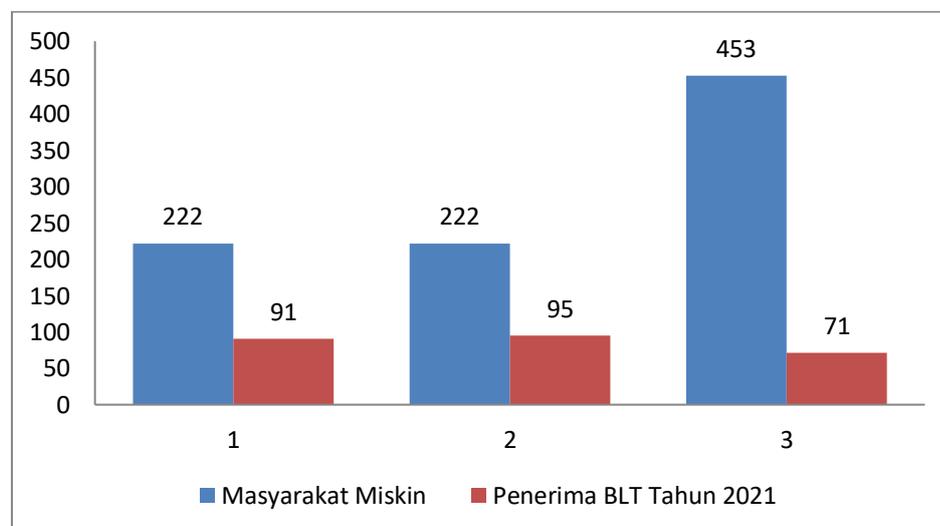
Nama Desa	Jumlah Tangga (KK)	Rumah Total	Jumlah Tangga (KK)	Rumah Miskin	Persentase
Keputran	759		491		65%
Pandansari	893		622		70%
Pandansari Selatan	893		565		63%
Pandansurat	1127		764		68%
Panggungrejo	677		378		56%
Panggungrejo Utara	542		453		84%
Siliwangi	787		526		67%
Sinarbaru	1716		346		20%
Sinarbaru Timur	595		400		67%
Sukoharjo I	1437		937		65%
Sukoharjo II	991		650		66%
Sukoharjo III	1693		521		31%
Sukoharjo III Barat	1233		556		45%
Sukoharjo IV	502		389		77%
Sukoyoso	565		380		67%
Waringin Sari Barat	1572		944		60%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu 2021.

Tabel 2 menunjukkan jumlah masyarakat miskin semua pekon di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2021. Kecamatan Sukoharjo memiliki 16 pekon dimana pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Pekon Panggungrejo Utara memiliki jumlah masyarakat miskin paling banyak jika

dibandingkan dengan pekon lainnya, dimana jumlah persentase masyarakat miskin sebesar 84%.

Pekon Panggungrejo Utara merupakan salah satu pekon yang ada di kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dimana Pekon Panggungrejo Utara merupakan salah satu pekon hasil pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu guna melancarkan program percepatan pembangunan. Seperti pekon lainnya, Pekon Panggungrejo Utara juga merasakan dampak akibat adanya pandemi. Pada Tabel 1.2, data menunjukkan jumlah masyarakat miskin seluruh pekon di Kecamatan Sukoharjo, dimana jumlah masyarakat miskin di Pekon Panggungrejo Utara memiliki jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan pekon lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu menyebutkan, bahwa Pekon Panggungrejo Utara merupakan pekon yang menjadi sorotan utama pemerintah dengan kondisi masyarakat miskin untuk segera dilakukan penanganan.



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2021.

Gambar 1.2 Jumlah Masyarakat miskin dan Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pekon Panggungrejo Utara Tahun 2019-2021.

Kementerian Sosial (2021) menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang menerima bantuan juga berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan sumber data yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

akan mendapatkan bantuan (Kemensos, 2021). Gambar 1.2 menunjukkan jumlah masyarakat miskin dan KPM program BLT tahun 2021 di Pekon Panggungrejo Utara. Pada gambar tersebut jumlah masyarakat miskin mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan angka masyarakat miskin tahun 2019 sebesar 222 KK, 2020 sebanyak 222 KK, dan pada 2021 mengalami kenaikan menjadi 453 KK. Jumlah masyarakat miskin di Pekon Panggungrejo Utara pada tahun 2019 sampai 2020 memiliki jumlah yang masih sama yaitu 222 KK. Namun pada tahun 2021 jumlah masyarakat miskin di Pekon Panggungrejo Utara mengalami kenaikan yang mencapai 453 KK. Gambar 1.2 juga menunjukkan jumlah masyarakat penerima BLT di Pekon Panggungrejo Utara dari tahun 2019 sampai 2021, dimana jumlah penerima bantuan pada tahun 2019 sebanyak 91 KK, tahun 2020 sebanyak 95 KK, dan pada tahun 2021 sebanyak 71 KK.

Setelah penulis melihat secara langsung kondisi lapangan dan bertanya pada aparat desa, bahwa terdapat hambatan saat mengalokasikan bantuan dimana data diri masyarakat yang menerima BLT tercampur dengan data diri masyarakat yang sudah mendapat jenis bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saat pencairan dana bantuan tidak turun sebagaimana mestinya banyak masyarakat yang protes ke pemerintahan desa. Masalah tersebut menghambat pemerintah desa dalam upaya mengalokasikan BLT secara tepat sasaran. Pemerintah Pekon Panggungrejo Utara menyebutkan bahwa pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang menerima Program BLT adalah sebesar 71 KK. Sumber dana Program BLT berasal dari Dana Desa sebesar 40%. Tahap pencairan Program Bantuan Langsung Tunai yaitu tahap lima bulan pertama, lima bulan kedua, dan tahap terakhir pada dua bulan di akhir tahun.

Kementerian Keuangan (2021) menyebutkan bahwa Program BLT menyumbang peran yang signifikan dalam membantu meningkatkan konsumsi ataupun daya beli masyarakat miskin terutama di desa-desa. Dengan adanya Program BLT Pemerintah Indonesia mengharapkan dapat membantu dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berbelanja ataupun memenuhi

kebutuhan hidup. Seperti yang dijelaskan oleh (Hendrik , 2021) dalam penelitiannya, disebutkan bahwa Program BLT yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dinilai dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang ekonomi yang terdampak pandemi.

PERMENDES Nomor 7 tahun 2021 menerangkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 akan dialokasikan untuk menangani permasalahan akibat pandemi, serta pendanaan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa. Kebijakan program BLT diperuntukkan untuk mengurangi dan mengentaskan masalah kemiskinan dan membantu masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraan selama pandemi. Namun, dalam pengalokasian program BLT jumlah dana bantuan masih terbilang belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat setiap harinya.

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin pedesaan dan perkotaan, jumlah masyarakat miskin Kabupaten Pringsewu menurut DTKS, jumlah penduduk dan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang telah diuraikan pada latar belakang, bahwa dapat disimpulkan masyarakat miskin Pekon Panggungrejo Utara mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan selama pandemi, maka dengan begitu penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pekon Panggungrejo Utara guna melihat efektivitas program BLT untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan selama pandemi.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah ditampilkan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pekon Panggungrejo Utara?

B. Tujuan Penelitian

Berikut dibawah ini merupakan tujuan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi”**.

1. Untuk mengetahui efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu masyarakat miskin selama pandemi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pekon Panggungrejo Utara.

C. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi daftar lain penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menjadi bahan-bahan yang dapat dijadikan referensi bagi penulis lain dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Program BLT.
2. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah setempat untuk terus meningkatkan kualitas dalam proses pengalokasian BLT.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan dimana masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, hunian, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai kondisi suatu kelompok masyarakat yang memiliki kondisi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kondisi kehidupan hidup guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Konsep kemiskinan memiliki dua pandangan yang berbeda dari dua aspek yaitu konsep kemiskinan dari aspek ekonomi dan konsep kemiskinan dari aspek sosial (Handler dan Hasenfeld, 2007). Arti kemiskinan dari konsep ekonomi yaitu masyarakat yang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, sedangkan kemiskinan menurut konsep sosial adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna menunjang kebutuhan hidup serta rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

BPS dan Departemen Sosial Republik Indonesia (2003) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Definisi layak dapat dilihat dari mampu dan kurang mampunya seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dari pendapatan yang dimiliki, dengan

begitu seorang individu yang masih kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dari hasil pendapatannya dapat dianggap masyarakat miskin.

Jenis-jenis Kemiskinan

Ragnar Nurkse, dalam Mudrajat Kuncoro (2000) menyebutkan bahwa kondisi suatu Negara dikatakan miskin juga dapat disebabkan oleh kebijakan yang miskin di dalamnya. Kurang tepatnya pemerintah dalam merancang dan merumuskan kebijakan guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi menjadi sebab kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penetapan sebuah kebijakan pemerintah sudah harus memastikan keadaan masyarakat dan lingkungan sebenarnya supaya kebijakan yang ada ditetapkan dapat secara maksimal menangani masalah. Kemiskinan dibagi dalam beberapa kategori yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kemiskinan Absolut

Kondisi masyarakat dapat dikatakan tergolong dalam kemiskinan absolute adalah apabila seorang individu memiliki jumlah pendapatan yang berada di posisi di bawah garis kemiskinan yang menyebabkan seseorang tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kemiskinan absolut pendapatan dijadikan ukuran untuk menentukan cukup atau tidak cukup seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah yang layak untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.

b) Kemiskinan Relatif

Kondisi masyarakat dapat tergolong sebagai kemiskinan relatif adalah apabila seorang individu memiliki keadaan dimana kebutuhan dasar untuk hidup telah terpenuhi, namun masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang ada disekitar. Jenis kemiskinan relatif memiliki ukuran yang berbeda dengan kemiskinan absolut, sebab untuk ukuran kemiskinan relatif akan selalu mengalami perubahan ketika tingkat kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan, dengan begitu ukuran kemiskinan relatif memiliki sifat dinamis.

c) Kemiskinan Kultural

Kondisi masyarakat yang dikatakan memiliki kondisi kemiskinan kultural adalah ketika seorang individu tidak memiliki keinginan untuk lebih baik dalam memperbaiki tingkat kehidupan meskipun seseorang tersebut memiliki peluang untuk dapat memperbaikinya. Kemiskinan kultural terjadi akibat rasa malas seseorang untuk memperbaiki kehidupan untuk mendapat hidup yang lebih baik.

Teori Keynes

Teori Keynessian atau Teori Klasik Keynes merupakan teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930. Teori tersebut mengatakan bahwa campur tangan ataupun peranan pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat pada masyarakat sehingga dapat mencapai posisi *Full Employment* (tingkat tenaga kerja penuh). Permintaan agregat dalam teori ini diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari uang yang dibelanjakan atau yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Adanya campur tangan dan peranan pemerintah dalam sistem perekonomian negara, diharapkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berkembang.

Teori Kemiskinan Menurut Todaro

Kemiskinan menurut Todaro (2002) yaitu suatu keadaan atau kondisi masyarakat memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengalami kondisi yang kurang mampu untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan, serta keadaan dimana masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi pendidikan dan kesehatan.

Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah jumlah pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasar guna menunjang kelangsungan hidup yang layak. Terbatasnya jumlah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka seorang individu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan karena pendapatan yang dimiliki tidak mencukupi, dalam keadaan tersebut masyarakat dapat dikatakan berada pada kondisi miskin.

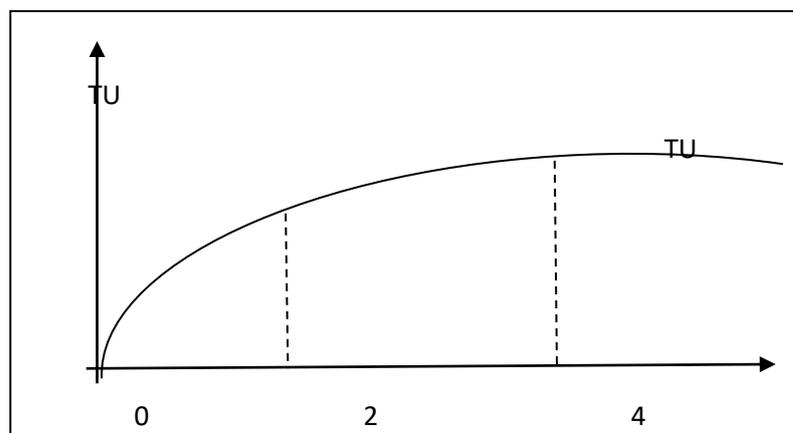
Indikator Ekonomi Masyarakat Miskin

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendapatan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu menetapkan bahwa indikator masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali ke puskesmas atau yang tersedia subsidi dari pemerintah.
- d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f) Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok yang diplester.
- g) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m^2 / orang.
- k) Mempunyai sumber air minimum yang berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya

2. Teori Utilitas

Dalam setiap harinya manusia akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa. Penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat akan menimbulkan kepuasan setelah pemakaian. Nilai guna (Utilitas) merupakan nilai yang diperoleh melalui kepuasan individu dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kepuasan total dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap orang disebut juga dengan utilitas total.



Sumber: Ekonomi Sumber Daya Manusia

Gambar 3. Kurva Teori Utilitas

3. Teori Perlindungan Sosial

Internasional Labour Organization (ILO,2012) menyebutkan bahwa kebijakan yang dibentuk untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan dan akses dalam pelayanan sosial bagi seluruh masyarakat, dengan cara memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dalam semua siklus kehidupan disebut juga dengan perlindungan sosial. Perlindungan sosial memiliki cakupan jaminan diantaranya: 1) keamanan pendapatan pokok yang berbentuk transfer sosial baik secara tunai ataupun sejenisnya, seperti dana pensiun bagi penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan dan jaminan serta pelayanan bagi pengangguran dan orang miskin, 2) akses universal bagi pelayanan sosial pada bidang kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, keamanan pangan, perumahan dan hal lain yang ditetapkan sesuai dengan program prioritas nasional.

Perlindungan sosial juga diartikan sebagai sekumpulan kebijakan dan program yang dibuat guna mengatasi dan menurunkan kemiskinan dan kerentanan dengan upaya peningkatan dan memperbaiki kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan (*Asian Development Bank*, 2014). Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Pengalokasian subsidi untuk masyarakat kurang mampu pertama kali dilakukan di Inggris sekitar abad 10 pada masa kekuasaan Raja Charles II, selanjutnya berkembang menjadi lebih luas pada abad 20. Terdapat landasan pokok dalam penerapan subsidi, diantaranya:

- a. Suatu bantuan yang bermanfaat dalam bentuk *cash payment* atau potongan pajak
- b. Mengurangi beban dan fokus pada manfaat untuk masyarakat
- c. Subsidi diperoleh dari pajak yang akan disalurkan kembali sebagai fungsi redistribusi

Indonesia memiliki beberapa bentuk subsidi, diantaranya yaitu:

- a. *Price distorsing subsidies*, merupakan jenis bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pengurangan harga di bawah harga pasar, sehingga dapat menstimulus masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas tersebut
- b. *Cash grant*, merupakan jenis bantuan yang dilakukan pemerintah berupa pemberian uang tunai sesuai dengan sasaran
- c. *In kind*, merupakan jenis bantuan tidak langsung atau bantuan berupa barang.

4. Pengertian Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa efektivitas memiliki arti berhasil ataupun berguna. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memiliki sebab dan akibat yang dikehendaki, atau dapat dikatakan bahwa ketika suatu fenomena terjadi dengan sebagaimana yang

telah diinginkan, maka fenomena tersebut dapat dikatakan efektif. (Kurniawan, 2019) menyebutkan bahwa efektivitas merupakan upaya dalam melakukan tugas, dan fungsi yang dilakukan oleh organisasi ataupun sejenisnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam pelaksanaannya. Menurut penjelasan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa efektifitas merupakan kata yang memiliki arti bahwa terdapat efek, akibat, serta pengaruh yang timbul setelah adanya kegiatan yang dilakukan ataupun kebijakan yang diterapkan.

Suatu organisasi, perusahaan, kegiatan ataupun program dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan sedari awal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2001), bahwa efektivitas didefinisikan sebagai merencanakan dan melaksanakan beberapa kebijakan yang dimana sumber daya manusia menjadi kontribusi dalam pencapaian tujuan. Di bawah ini merupakan empat kategori sifat efektivitas:

- a) Kondisi ekonomi secara menyeluruh serta memiliki sifat umum untuk daerah tertentu merupakan target utama yang dituju.
- b) Terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang dapat menghasilkan pola tertentu dalam kehidupan.
- c) Menjadi penentu tindakan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu program.
- d) Mengikutsertakan masyarakat.

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan rencana yang telah dirancang dan akan dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai. Ketika hasil yang didapat sesuai dengan rencana yang telah disiapkan maka hal tersebut dikatakan efektif, namun ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang telah direncanakan maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. (Makmur, 2010) menyebutkan bahwa dalam bukunya yang berjudul efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan efektivitas dapat diukur melalui beberapa hal sebagaimana dibawah ini (Carly, 2020):

- a) Ketepatan dalam penentuan waktu, penggunaan waktu yang tepat dapat mempengaruhi sebesar besar tingkat keefektivitasan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- b) Ketepatan perhitungan nilai, perhitungan nilai dilakukan guna mencegah suatu program mengalami kekurangan dana dalam pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yang menyebabkan tidak terlaksananya program secara maksimal.
- c) Ketepatan sasaran dalam mengalokasikan sebuah program, hal ini digunakan untuk menentukan ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
- d) Tepat guna, cara pengukuran ini dilakukan bertujuan untuk melihat seberapa efektif sebuah program dalam mengatasi permasalahan yang sedang diatasi.
- e) Tepat distribusi atau ketepatan dalam melaksanakan perintah, hal tersebut dilakukan organisasi ataupun perusahaan untuk memberikan perintah dan arahan yang jelas dan mudah dipahami supaya dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi kegagalan yang menimbulkan hasil yang tidak efektif.
- f) Tepat administrasi, ketepatan dalam administrasi menunjukkan seberapa baik kinerja aparat desa dalam menjalankan dan mengalokasikan program.

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah kebijakan yang dibuat pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan saat pandemi dengan cara membagikan bantuan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan selama pandemi. Dana yang digunakan untuk mendorong terlaksananya program BLT adalah dana desa. Dana desa digunakan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dalam mengurangi dan mnegentaskan kemiskinan selama masa pandemi.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa 40% Dana Desa akan diprioritaskan untuk menangani masalah yang timbul akibat pandemi. Masalah utama yang diprioritaskan untuk segera ditangani adalah kondisi ekonomi masyarakat

miskin yang harus dipertahankan selama pandemi, hal tersebut sesuai dengan tujuan Program BLT yaitu mempertahankan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin selama pandemi. Program BLT memiliki tujuan yang ditargetkan pemerintah dalam pengalokasiannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Mempertahankan dan membantu masyarakat miskin supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam sehari-hari.
- b) Mengurangi dan mencegah berkurangnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin yang terjadi akibat kesulitan ekonomi selama pandemi.
- c) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dari tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa keefektivitasan dari Program BLT adalah ketika tujuan dari pengalokasian program tercapai sebagaimana yang ingin dicapai.

5. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Pasal 1 ayat 8a Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa akan dilakokasikan untuk menangani permasalahan pandemi yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam, dimana bencana non alam dapat dikatakan sebagai bencana yang menimpa masyarakat luas dan dinilai menimbulkan dampak buruk bagi kondisi nasional. Pemerintah Indonesia dengan segala upaya yang dikerahkan untuk membantu dan mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar adalah dengan cara menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penyaluran Program BLT difokuskan untuk menangani dan membantu keluarga miskin yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan saat pandemi, dimana kriteria keluarga yang menerima Program BLT adalah mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan, tidak termasuk data keluarga yang menerima

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu pra kerja, serta kondisi keluarga yang memiliki anggota yang sedang sakit.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Dalam proses penyaluran Dana Desa dimana saat pandemi Dana Desa akan di prioritaskan untuk menangani permasalahan masyarakat miskin guna membantu masyarakat yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam proses pembagian dan penyaluran dana desa untuk menangani berbagai masalah di desa, maka dibawah ini merupakan proses penyaluran Dana Desa dimana belum tersalur tahap I:

- a. Dana Desa pada tahap I akan disalurkan selama tiga bulan, dimana besaran dana dan persyaratan pada setiap bulannya adalah sebagai berikut:
 - 1) 15% untuk bulan pertama dengan syarat Peraturan Kepala Desa harus melakukan penetapan keluarga miskin bagi penerima Program BLT Desa.
 - 2) 15% untuk bulan kedua dengan syarat bahwa laporan penyaluran BLT tahap I.
 - 3) 10% untuk bulan ketiga dengan syarat laporan penyaluran BLT tahap II
- b. Dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan III akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I akan dilaksanakan dengan estimasi waktu paling cepat pada bulan Januari dengan besaran dana yaitu 40%.
 - 2) Tahap II akan dilaksanakan dengan estimasi waktu paling cepat pada bulan Maret dengan besaran dana yaitu 40%.
 - 3) Tahap III akan dilaksanakan dengan estimasi waktu paling cepat pada bulan Juni dengan besaran dana yaitu 20% dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Untuk pelaporan realisasi penyerapan sampai pada tahap II adalah paling sedikit sebesar 75%, sedangkan untuk pencapaian keluaran harus menunjukkan angka paling sedikit 50%.

- (b) Laporan konvergensi dalam pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (c) Peraturan Kepala Desa dalam penetapan keluarga penerima Program BLT.
- c. Dana Desa untuk tahap I akan diprioritaskan untuk melaksanakan Program BLT Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu bentuk keuangan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang telah diperuntukkan untuk mendanai segala aktivitas desa berupa pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ditransfer dari APBD Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah diprioritaskan dalam pendanaan untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan pada bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dan penggunaan Dana Desa pemerintah memprioritaskan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, dimana manfaat yang dimaksud adalah (1) dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, (2) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) dapat mengurangi dan menganggulangi kemiskinan, dan (4) dapat meningkatkan pelayanan publik di desa.

Pasal 6 memuat beberapa poin yang menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa dimana poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dimana kegiatan ini mengutamakan:
 - a. Untuk membiayai terlaksananya program lintas kegiatan

- b. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan
 - c. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin
 - d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas penggunaan dana desa dimana hal tersebut mengacu pada:
- a. Untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan
 - b. Untuk melakukan pendataan terbaru dalam data kemiskinan
 - c. Untuk kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya dengan tujuan menyediakan lapangan pekerjaan
 - d. Untuk memberikan dan menyediakan modal usaha dan melakukan pelatihan untuk masyarakat desa yang dalam kondisi pengangguran, setengah menganggur, serta keluarga miskin
 - e. Untuk mencegah penambahan jumlah stunting.

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Dan Peneliti	Metode Dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi masyarakat (Studi kasus Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang) Heru Rochmansjah (2021)	Penelitian Kualitatif Variabel Dependen: Alokasi Dana Desa Variabel Independen: Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pemulihan Ekonomi masyarakat yang berasal dari pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Citali dinilai belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari hasil

			<p>pertanian belum meningkat, berkurangnya angkatan kerja yang disebabkan PHK massal dan populasi warga Desa Citali yang semakin menua, dengan begitu program Pemulihan Ekonomi Masyarakat akan menjadi pemulihan yang bersifat jangka panjang yang harus dijadikan fokus oleh pemerintah desa.</p>
2	<p>Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono,</p>	<p>Penelitian Kualitatif dengan Teknik Analisis deskriptif</p> <p>Variabel Dependen: Bantuan Langsung Tunai (BLT)</p> <p>Variabel Independen: Perekonomian Masyarakat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasakan bahwa program BLT sangat bermanfaat karena dengan adanya bantuan langsung tunai masyarakat terdampak</p>

	Kecamatan Fanayama, Nias Selatan) Hendrik Kuasa Sihura (2021)		pandemi Covid-19 merasakan dapat menunjang kebutuhan ekonomi.
3	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Carly Erfly Fernando Maun (2020)	Metode Kualitatif dengan Teknik Analisis Data yaitu Deskriptif Kualitatif. Variabel Dependen: Bantuan Langsung Tunai Variabel Independen: Masyarakat Miskin Desa Talaitad	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifitasan dari adanya Program BLT dinilai bermanfaat bagi masyarakat, dan program ini juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena dampak positif yang dirasakan sangat terasa membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
4	Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19.	Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Fenomenologi. Variabel Dependen: Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT telah dikelola dengan baik dan maksimal sesuai

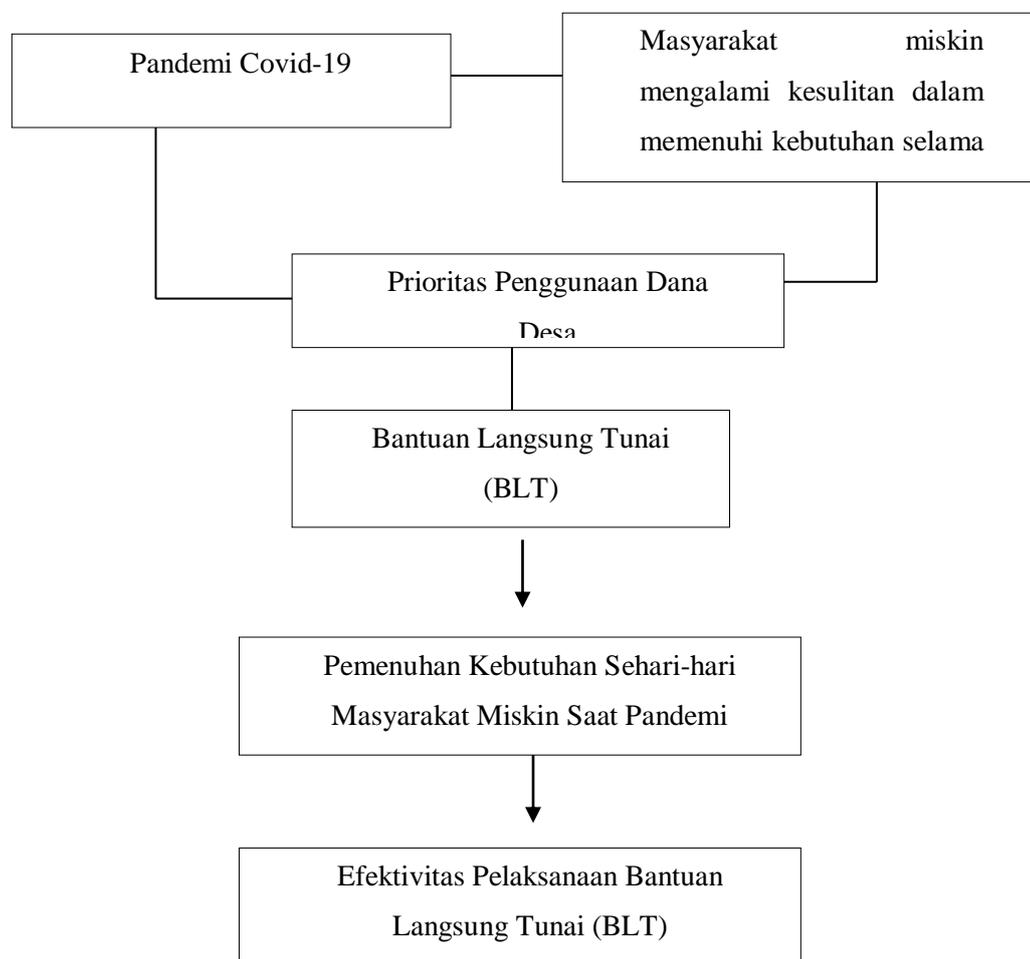
Ainin Azhari and Dwi Suhartini (2021)	Variabel Independen: Kesejahteraan Masyarakat	dengan ketentuan, namun masyarakat dinilai belum bisa memanfaatkan secara maksimal dalam menggunakan dana tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, namun pemerintah desa melakukan edukasi kepada masyarakat supaya dapat menggunakan dana dengan lebih baik.
---	--	---

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan maksud mengetahui seberapa efektif Bantuan Langsung Tunai dalam membantu dan mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin di Pekon Sukoharjo IV selama pandemi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu daerah yang menjadi objek penelitian berbeda yaitu Pekon Sukoharjo IV sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait masyarakat miskin dan BLT, dan status desa yang masih merupakan desa tertinggal membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti.

2. Kerangka Pemikiran

Pandemi yang terhitung mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2019 menjadikan Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi *Covid-19*

menjadi bencana non-alam yang dampak buruknya dirasakan oleh semua masyarakat. Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa ketika terjadi bencana nasional maka harus segera dilakukan penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menyalurkan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam bentuk tunai. Seperti yang telah dijelaskan bahwa, dana desa tahun 2022 masih akan memprioritaskan untuk menangani permasalahan akibat pandemi khususnya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat dimana penulis melakukan penelitian yaitu di Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan waktu penelitian berawal dari bulan September 2022 sampai Maret 2023.

B. Jenis dan Sumber Data

a) Data primer

Jenis data primer merupakan jenis data yang cara mendapatkannya diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk mendapat jawaban yang diinginkan dari data primer maka dibutuhkan responden. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat desa Pekon Panggungrejo Utara yang menerima manfaat dari Program BLT dan pendamping Program BLT merupakan informan dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan tiga cara dalam mendapatkan data primer yang dibutuhkan, cara tersebut meliputi wawancara yang dilakukan dengan aparat pemerintah desa di Pekon Panggungrejo Utara dan masyarakat yang mendapatkan BLT, dokumentasi yang dilakukan di Kantor Balai Desa Pekon Panggungrejo Utara terkait profil desa dan lainnya, serta observasi yang dilakukan penulis untuk melihat langsung keadaan di desa.

b) Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari berbagai lembaga ataupun instansi yang mempublikasikan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari kantor balai desa Pekon Panggungrejo Utara untuk mendapatkan data

jumlah masyarakat miskin, serta jumlah masyarakat penerima bantuan, selanjutnya Kecamatan Sukoharjo untuk mendapatkan jumlah masyarakat miskin semua Pekon di Kecamatan Sukoharjo, dan Kantor Dinas sosial Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan data jumlah masyarakat miskin seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

C. Batasan Operasional

Batasan dalam penelitian digunakan untuk menentukan jangkauan tentang apa yang akan diteliti supaya tidak menyebabkan pembahasan diluar dari penelitian yang akan dilakukan. Maka dengan itu, penulis menetapkan batasan operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Miskin

Data jumlah masyarakat miskin yang digunakan merupakan data jumlah masyarakat miskin Pekon Panggungrejo Utara Tahun 2021 yaitu sebanyak 453 KK. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis bersumber dari pemerintah Pekon Panggungrejo Utara.

2. Bantuan Langsung Tunai

Data Bantuan Langsung Tunai yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah penerima BLT tahun 2021 di Pekon Panggungrejo Utara dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanyak 71 KK. Data tersebut bersumber dari Pemerintah Pekon Panggungrejo Utara.

D. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel memiliki hubungan yang saling terkait, dimana populasi dapat menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian yang akan dilakukan.

1. Populasi

Populasi pada penelitian adalah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai tahun 2021 di Pekon Panggungrejo Utara dengan jumlah 71 KK. Jumlah masyarakat miskin Pekon Panggungrejo Utara tahun 2021 yaitu sebanyak 453 KK, namun masyarakat yang menerima BLT berjumlah 71 KK. Hal tersebut dikarenakan masyarakat penerima BLT harus merupakan masyarakat yang

tidak sedang menerima jenis bantuan lain seperti PKH, BST, dan BPNT. Penelitian ini menggunakan teknik sensus dimana responden diambil dari keseluruhan populasi tanpa pengambilan sampel untuk mendapatkan jumlah responden.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan dengan cara mencatat sebuah dokumen ataupun arsip yang dimiliki sebuah organisasi ataupun perusahaan sebagai bahan-bahan dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini banyak bersumber dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kantor Balai Desa Panggungrejo Utara. Data dalam bentuk *softfile* maupun *hardcopy* yang perlu didokumentasikan.

2. Wawancara

Metode wawancara dapat digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data tentang topik yang akan dibahas dengan cara menanyakan secara langsung kepada narasumber yang memiliki hubungan dengan data yang sedang dicari oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber dari aparat pemerintah Kecamatan Sukoharjo, aparat pemerintah Balai Pekon Panggungrejo Utara, serta keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai di Pekon Panggungrejo Utara.

3. Kuesioner

Dalam penelitian kualitatif, kuesioner merupakan salah satu jenis teknik pengambilan data yang dimana peneliti memberikan pertanyaan dalam bentuk tertulis dan akan dijawab oleh responden (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan jenis Skala Linkert, dimana Skala Likert merupakan jenis kuesioner untuk mengukur pendapat dan persepsi seorang responden tentang fenomena topik yang diteliti.

4. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik atau metode pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif dimana cara penulis mendapatkan data yang diinginkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada gejala-gejala yang sedang terjadi dan memiliki hubungan dengan topik yang menjadi fokus pada penelitian secara tersusun atau sistematis.

F. Teknik Pengolahan Data

Bentuk data dalam penelitian kualitatif yang bersumber dari cara pengumpulan data berupa kuesioner adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini memiliki beberapa teknik pengolahan data yang diantaranya adalah sebagai berikut (Suryono, 2017):

a. Editing

Dalam teknik editing hal yang perlu dilakukan adalah mengedit data serta memeriksa ulang data-data yang telah terkumpul setelah melakukan penelitian.

b. Koding

Tahap ini penulis akan melakukan pengkodean data dengan cara membuat jenis-jenis pengkodean tertentu untuk jawaban responden yang telah mengisi kuesioner yang selanjutnya dapat memudahkan dalam pengolahan data.

c. Tabulating

Tabulating dilakukan dengan tujuan untuk menghitung persentase dari jawaban responden.

G. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan sebuah cara untuk menyampaikan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan melalui tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dibawah ini merupakan tahap-tahap dalam penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif:

1. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, tahap penyajian data dilakukan guna menyusun dan mengurutkan data-data yang telah di dapat di lapangan yang selanjutnya dapat dideskripsikan dan ditarik kesimpulan. Dalam penyajian data terdapat unsure-unsur yang perlu dimiliki yaitu harus terdapat matrik, bagan, dan grafik. Tujuan dilakukannya penyajian data secara berurutan adalah untuk memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian. Data yang telah didapat dari berbagai sumber seperti data dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, data dari Kecamatan Sukoharjo, dan data yang bersumber dari Kantor Balai Pekon Panggungrejo Utara, serta hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yang menerima bantuan.

2. Menarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, tahap menarik kesimpulan dilakukan guna membahas kembali secara singkat hasil dari penelitian namun tidak mengurangi kevalidan sebuah penelitian. Setelah dua tahap diatas dilakukan maka tahap terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Pekon Panggungrejo Utara yang menerima bantuan langsung tunai dengan bahasa yang lebih singkat namun jelas dan tanpa mengurangi poin penting yang didapatkan selama penelitian.

Dalam penelitian ini cara analisis yang digunakan yaitu dengan pemberian skor dengan menggunakan Skala Likert yang selanjutnya akan diuraikan secara deskripsif. Responden akan menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan memperhatikan ukuran yang sudah dicantumkan dalam lembaran kuesioner. Penggunaan angka untuk menghitung jawaban responden dapat memudahkan penelitian mengukur fenomena yang diteliti. Responden dapat memilih angka sesuai dengan besaran yang dirasakan melalui kalimat yang disampaikan dalam pertanyaan yang diberikan peneliti. Berikut dibawah ini adalah skor yang digunakan dalam penelitian dengan metode Skala Likert:

Tabel 3.2 Bentuk Skor Pada Penelitian

NO	KODE	Keterangan	Skor
1	STS	Sangat Tidak Efektif	1
2	TS	Tidak Efektif	2
3	RG	Kurang Efektif	3
4	S	Efektif	4
5	SS	Sangat Efektif	5

Setelah melakukan pengisian angket oleh responden, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata dari setiap poin pertanyaan yang diajukan, maka dengan begitu penulis akan menghitung presentase capaian yang didapat dari nilai rata-rata jawaban responden lalu dibagi dengan skor ideal dan dikali seratus. Dengan hasil presentase tersebut, maka di bawah ini merupakan kelas interval dari jenis presentase hasil yang diperoleh:

Tabel 3.3 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
< 40%	Sangat tidak efektif
40% - 59,99%	Tidak efektif
60% - 79,99%	Cukup efektif
>80%	Sangat efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991.

H. Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan atau kevalidan suatu kuesioner. Kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dapat menjawab fenomena yang akan diukur Selama penelitian. Uji validitas penelitian ini menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan kriteria yang digunakan yaitu ketika r hitung memiliki nilai lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel), dengan hasil tersebut maka data dapat dikatakan valid (Ghozali, 2016).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu bentuk pengukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana pengukuran tanpa bias (tanpa kesalahan), hal tersebut juga

menjamin konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin pada instrument yang digunakan selama penelitian. Uji reliabilitas dapat dikatakan sebagai ukuran indikator stabilitas dan konsistensi dimana instrument tersebut mengukur konsep serta nilai kesesuaian.

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner, dimana pernyataan tersebut menyatakan bahwa kuesioner akan dikatakan reliabel ketika jawaban responden stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengukuran sekali saja atau *One Shoot*. Pengukuran ini dilakukan hanya sekali dan hasil penelitian akan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dengan menggunakan SPSS untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Setelah dilakukan pengujian, hasil akan dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Kedua, pengukuran ulang atau *Repeat Measure*. Dalam pengukuran ini seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian akan dilihat apakah akan tetap konsisten dengan jawaban yang diberikan. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengukuran yang pertama yaitu pengukuran *One Shoot*.

I. Tabel Rancangan Analisis Deskriptif

Setelah mendapat data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat rancangan analisis deskriptif dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rancangan Analisis Deskriptif Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi.

Pernyataan	Tanggapan Responden					Total	Mean	Skor Ideal	Persentase Capaian	Ket
	Skor Yang di berikan Responden									
	1	2	3	4	5					
	Frek									
	%									
Indikator Efektivitas	Skor									

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi di Pekon Panggungrejo Utara”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pekon Panggungrejo Utara sangat efektif, dimana hal tersebut terlihat dari hasil penelitian dengan hasil penghitungan efektivitas sebesar 87,51%. Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Pekon Panggungrejo Utara sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Proses pengalokasian program BLT mulai dari pendataan KPM, pembentukan rekening untuk menerima uang bantuan, serta pencairan dana sudah dilakukan oleh aparat desa dengan sebaik mungkin yang menghasilkan program BLT sudah teralokasi cukup merata dengan hasil penelitian indikator tepat distribusi sebesar 88,73%.

2. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dalam pengalokasian BLT di Pekon Panggungrejo Utara ada pada indikator efektivitas tepat waktu, indikator tepat nilai, serta indikator tepat guna. Pada indikator tepat waktu masyarakat yang mengungkapkan adanya keterlambatan pencairan dana sudah dikonfirmasi oleh aparat desa bahwa hal tersebut terjadi karena bank yang bertanggung jawab membutuhkan waktu untuk dapat mencairkan dana bantuan ke seluruh rekening KPM. Faktor penghambat untuk indikator tepat nilai yaitu ada masyarakat yang mengungkapkan bahwa jenis bantuan yang diterima berbeda, namun permasalahan tersebut sudah dijelaskan oleh aparat desa bahwa masyarakat masih sering keliru akan jenis-jenis bantuan. Kendala pada

indikator tepat guna yaitu masyarakat banyak menggunakan dana BLT untuk keperluan lain diluar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan terkait efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Pekon Panggungrejo, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Jumlah masyarakat yang menerima bantuan perlu ditingkatkan lagi, sebab masyarakat yang mengalami kesulitan masih banyak namun tidak mendapat bantuan, dengan begitu tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dapat teratasi.

2. Untuk Masyarakat

Tujuan pemerintah mengalokasikan bantuan yaitu guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, sehingga dengan masyarakat yang menggunakan dana bantuan sebaik mungkin diharapkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dapat terwujud dan masyarakat yang mendapat bantuan sedikit banyak bisa mengatasi kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. (2012)). *Prosedur Penelitian : Sampel dan Sampling Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Budiarty I. (2019:53). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Bandarlampung : Pusaka Media
- BPS. (2021). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. Lampung: Badan Pusat Statistika.
- Carly, E. F. M. (2020). *Efektivits Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Taheran Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Heru. R. (2021). *Efektivitas Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat*. Padang, Sumatera Utara. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Hendrik, K. S. (2020). *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19*. Nias Selatan. Universitas Nias Raya.
- Istiana, H. (2015). *Pengkajian Konsep Dan Indikator Kemiskinan*. Yogyakarta. Kementerian Sosial RI.
- Ju Lan, T. (2019). *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Pedesaan Ruang Sosial, Kebijakan, Dan Pola Kesetaraan Sosial*. Jakarta. LIPI Press.
- Kementerian Keuangan. *Peran Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Penanganan Covid-19*. Diakses 3 Maret 2022
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
- Nilda, M. J. (2021). *Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS*. DDI. Makasar

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 11. Bandung : CV.Alfabeta.
- World Bank. (2012). *Public Expenditure Review Summary: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 1*. World Bank